



## **SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**

**MEDIA : Siwalima**

**Senin, 25 Juli 2016**

### **Jaksa Didesak Usut Proyek Pembangunan MCK di Aru**

**Ambon** - Kejari Dobo diminta untuk mengusut proyek pembangunan sarana dan prasarana MCK septik tank Komunal di Dinas PU Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2015. Pasalnya, proyek senilai Rp. 2.964.886.672 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengadaan konstruksi jamban sebanyak 21 paket, diduga sarat dengan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Kami minta agar Kejari Dobo segera mengusut proyek pembangunan MCK yang merupakan proyek milik Dinas PU kabupaten Kepulauan Aru itu, karena proyek milyaran rupiah itu diduga sarat dengan KKN bahkan proyeknya juga tidak sesuai dengan bestek,” ungkap Ketua Aliansi Gerakan Anti Korupsi (AGAS) Maluku, Jonathan Pesurnay, kepada *Siwalima*, di Ambon, Sabtu (23/7).

Kendati hingga kini, kata dia, belum ada laporan yang disampaikan kepada Kejari Dobo namun diharapkan jaksa proaktif.

“Jaksa harus proaktif walaupun belum ada laporan yang disampaikan, karena ini anggaran yang tidak sedikit yang diperuntukan untuk pembangunan MCK,” tandasnya.

Pesurnay berharap, jaksa tidak berlama-lama, proyek ini harus segera diusut tanpa adanya diskriminasi dan tebang pilih.

Sebelumnya, diduga bertopeng Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), 21 paket proyek konstruksi Jamban dikerjakan oleh oknum Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kepulauan Aru.

Berdasarkan informasi yang dihimpun *Siwalima* tahun anggaran 2015 Dinas PU Kabupaten Kepulauan Aru mengalokasikan anggaran senilai Rp. 2.964.886.672 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler, untuk pengadaan konstruksi jamban sebanyak 21 paket.

21 paket tersebut tersebar pada tujuh lokasi berbeda diantaranya, pembangunan sarana dan prasarana MCK septik tank Komunal Kelurahan Siwalima 5 paket dengan nilai Rp. 705.848.000, Kelurahan Galay Dubu 4 paket Rp. 564.754.000, Kecamatan Aru Tengah Selatan khususnya Desa Penambulai 3 paket Rp 423.565.001, Kecamatan Aru Tengah Timur Desa Kobror juga 3 paket Rp. 423.565.001.

Berikutnya, Desa Wangel 2 paket Rp. 282.377.334, Desa Durjela 2 paket Rp. 282.377.334 dan Desa Wokam juga 2 paket Rp. 282.377.334.



## SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

**MEDIA : Siwalima**

Kendati nilai proyek Rp 2,9 milyar lebih tersebut, namun untuk mengelabui publik dan menghindari beban pajak, pihak perencanaan Dinas PU lalu mengatasnamakan KSM dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud.

Berbeda dengan fakta di lapangan, masyarakat dilibatkan dalam pekerjaan namun ditangani langsung oleh oknum-oknum kontraktor maupun oknum PNS di Dinas PU.

Seperti kecamatan Pp Aru, di Desa Wokam dan Dusun Kota Lama, pembangunan sarana dan prasarana MCK septik tank komunal 2 paket itu,

Diduga paket MCK itu telah dilakukan realisasi 100 persen, namun hampir sebagian besar belum ada septik tank komunal dan ada pula yang belum rampung, selain itu upah warga juga belum direalisasi seperti yang dialami warga di Desa Wangel.

Menaggapinya, salah satu warga, Deni Waisabi kepada *Siwalima* di Dobo, kemarin mengungkapkan, kendati paket pembangunan sarana dan prasarana MCK septik tank komunal merupakan perencanaan langsung dari Dinas PU, namun harusnya benar-benar dikerjakan dan ditangani langsung oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) setempat sebagaimana tertera dalam dokumen.

Kata dia, hal ini perlu ditelusuri oleh pihak penegak hukum, karena kuat dugaan hanya bertopeng KSM untuk menghindari beban pajak, namun diselimuti kepentingan oknum-oknum tertentu di Dinas PU Kabupaten Kepulauan Aru. **(S-16)**